

ISSN (Print) : 1412-7601
 ISSN (Online) : 2654-8712
 Volume 11, No.2 September 2025
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Maad Adnan, Siti Sriningsih, Ahmad Zaenal Wafiq.

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:

Regional Expenditure, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Income, Panel Data Regression.

ABSTRACT : *This study aims to analyze the factors influencing regional spending in West Nusa Tenggara Province for the 2019-2023 period. The method used in this study is panel data regression with independent variables consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Regional Original Revenue (PAD). The results show that partially, DBH, DAU, and PAD have a positive and significant effect on regional spending, while DAK has no significant effect. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on regional spending with an adjusted R-squared value of 95.02%. This research is expected to provide input for local governments in budget planning and management.*

Kata Kunci:

Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Regresi Data Panel.

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan variabel independen yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, DBH, DAU, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai adjusted R-squared sebesar 95,02%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: madnann21@gmail.com

2025, EKONOBIS All right reserved

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belanja daerah menjadi salah satu instrumen kunci dalam menjaga kelangsungan pemerintahan, karena digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Terlebih lagi, dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan mereka

dengan baik dan efisien. Tantangan umum yang sering dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah dalam hal keuangan adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, penerimaan dari pemerintah pusat, seperti hibah, bantuan, serta pendapatan dari pajak dan bukan

pajak, mendominasi komposisi APBD (Rusmita, 2016).

Salah satu provinsi yang menghadapi tantangan dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 2 kota dan 8 kabupaten, yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara,

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus berkembang, serta kurangnya pertumbuhan lapangan pekerjaan, masalah pengangguran semakin signifikan. Berikut ini adalah data mengenai tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi NTB.

Tabel 1 Data Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (dalam rupiah)	Realisasi Belanja Daerah (dalam rupiah)	Persentase Realisasi Belanja Daerah (%)
2019	6.077.645.971.342,00	5.148.158.519.514,76	84,70
2020	4.894.082.197.261,00	4.559.487.835.427,00	93
2021	5.621.732.619.476,00	4.888.036.273.650,00	87
2022	5.440.432.069.396,00	5.015.229.533.360,57	92,18
2023	5.246.187.623.750,00	4.754.690.643.514,25	90,63

Sumber: NTB Satu Data 2023

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dana ini terdiri dari tiga bagian utama: Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk kebutuhan umum daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk kegiatan atau sektor tertentu, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pendapatan daerah seperti pajak dan

sumber daya alam. Dengan dana ini, diharapkan pemerintah daerah bisa bekerja lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ernayani, 2017).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dan mendukung desentralisasi. DAU merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah dalam bentuk block grant, yang memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah (May et al., 2022).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu melalui APBN untuk membiayai kebutuhan khusus yang tidak bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Meskipun bersumber dari pusat, daerah penerima wajib menyediakan dana pendamping dari APBD sebagai bentuk kontribusi. DAK umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang berumur panjang, dan juga dapat digunakan untuk operasional dan pemeliharaan sarana tertentu, namun hanya untuk jangka waktu maksimal tiga tahun (Santosa & Rofiq, 2013).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil adalah anggaran yang berasal dari penerimaan APBN. Distribusinya di berbagai wilayah ditentukan berdasarkan persentase, dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan khusus di setiap wilayah tersebut sekaligus mendukung desentralisasi. Pelaksanaan Dana Bagi

Hasil dilakukan berdasarkan prinsip sesuai dengan sumbernya, yang berarti dana tersebut dibagi sesuai dengan daerah yang menghasilkan (Putri & Kurnia, 2023). Keberhasilan dalam memaksimalkan belanja daerah sangat dipengaruhi oleh tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain faktor dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (Apriani, 2015). Ketika PAD mengalami peningkatan, dana yang tersedia untuk pemerintah daerah akan lebih besar, yang juga akan berdampak positif pada tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih mengeksplorasi potensi yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat, di mana peningkatan PAD di suatu daerah akan berimplikasi pada kemampuan daerah untuk meningkatkan pengeluaran belanja daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten/Kota Provinsi NTB, yang mencakup periode 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber,

termasuk publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), NTB Satu Data, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari publikasi BPS, serta sumber sekunder seperti makalah ilmiah, buku, dan artikel. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) selama 5 tahun dan lokasi (cross section) di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi NTB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi NTB - dan variabel dependen, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Analisis dilakukan dengan menggunakan Regresi Data Panel, dengan menggunakan model OLS. Selain itu, uji statistik seperti uji asumsi klasik, koefisien determinasi (R^2), uji-t, dan uji F digunakan untuk mengevaluasi signifikansi variabel-variabel dalam model. Pengujian-pengujian ini membantu menilai kekuatan penjelas dari model dan kontribusi individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan pengolahan secara statistik, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BD = -1175 + 1.249DBH + 2.023DAU + 0.132DAK + 0.666PAD$$

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 03/11/25 Time: 13:22
Sample: 2019 2023
Included observations: 50

Variable	Coefficient Variance	Uncentered MF	Centered MF
C	4.93E+21	15.27410	NA
DBH	0.159302	4.343243	1.245911
DAU	0.033597	55.20129	6.137500
DAK	0.060442	23.19591	5.124648
PAD	0.042596	7.271792	1.588751

Sumber: Hasil data diolah Eviews 12

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel-variabel yang digunakan karena nilai centered VIF lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
Method: Robust Least Squares
Date: 05/09/25 Time: 13:13
Sample: 2019 2023
Included observations: 50
Method: M-estimation
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)
Huber Type I Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	9.59E+10	3.65E+10	2.628710	0.0086
DBH	-0.239373	0.207336	-1.154519	0.2483
DAU	-0.075075	0.095217	-0.788458	0.4304
DAK	0.156406	0.127712	1.224683	0.2207
PAD	0.043700	0.107213	0.407602	0.6836

Robust Statistics			
R-squared	0.047201	Adjusted R-squared	-0.037492
Rw-squared	0.070829	Adjust Rw-squared	0.070829
Akaike info criterion	46.36592	Schwarz criterion	59.41290
Deviance	1.89E+23	Scale	6.88E+10
Rn-squared statistic	2.966894	Prob(Rn-squared stat.)	0.563381

Sumber: Hasil data diolah Eviews 12

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan regresi robust di atas

mengindikasikan bahwa variabel DBH, DAU, DAK dan PAD tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

$df=(n-k);(0,05)=(50-2)$

$;(0,05)=(45;0,05)=2,01410$

Hasil uji t pada variabel Dana Bagi Hasil (X1) di peroleh nilai t-hitung sebesar $3.130026 > 2,01410$ dan nilai probabilitas $0,0031 < 0,05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa t hitung berada di daerah penolakan H0 dan H1 diterima, berarti Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap tingkat Belanja Daerah.

Hasil Uji t pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) di peroleh nilai t-hitung sebesar $11.03996 > 2,01410$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa t hitung berada di daerah penolakan H0 dan H1 diterima.

Hasil Uji t pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) di peroleh nilai t-hitung sebesar $0,538903 < 2,01410$ dan nilai probabilitas sebesar $0,5296 > 0,05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa T hitung berada di daerah H0 diterima dan H1 ditolak.

Hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di peroleh nilai t-hitung sebesar $3,228090 > 2,01410$ dan nilai probabilitas $0,0023 < 0,05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa T hitung berada di daerah penolakan H0 dan H1 diterima.

Uji Simultan (Uji F)

$F\text{-tabel} = (k-1), (n-k) = (5-1), (50-5) = (4;45) = 2,58$

Nilai f-hitung sebesar $234,9716 > f\text{-tabel}$ yaitu 2,58 dan nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$ sehingga variabel X1, X2, X3, dan X4 (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Daerah) berpengaruh secara bersama sama terhadap Belanja Daerah.

Uji Koefisien Determinasi R²

Dapat dilihat nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,950248 atau 95,0248 persen yang dimana nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah menjelaskan variabel dependen yaitu belanja daerah. Sedangkan 4,9752 persen disebabkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Dana Bagi Hasil (X1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan, dana bagi hasil Kabupaten/Kota menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,00124 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0031 atau lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Liando & Hermanto, 2017). dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur” yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena jika dana bagi hasil naik, pemerintah daerah mampu memenuhi target belanja daerah yang sudah direncanakan dengan adanya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan, dana alokasi umum menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,00202 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) dengan judul

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013” yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena jika dana alokasi umum naik maka pemerintah daerah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat, karena dana alokasi umum merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna untuk melaksanakan pemerintahannya termasuk pembiayaan belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Daerah (Y)

Dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan, dana alokasi khusus menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,00013 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5926 atau lebih besar dari 0,05, artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ariyanti et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di

Pulau Sumatera” yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena karakteristik dana alokasi khusus yang spesifik dan terbatas yang dimana dana alokasi khusus dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Karena itu penggunaan dana alokasi khusus sangat terbatas hanya pada jenis belanja tertentu, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan struktur belanja daerah. Ketika dana ini hanya digunakan untuk sektor tertentu dan tidak dapat dialihkan ke kebutuhan lainnya, maka meskipun terjadi peningkatan dana alokasi khusus, dampaknya terhadap belanja secara total bisa saja tidak signifikan secara agregat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X4) terhadap Belanja Daerah (Y)

Dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan, pendapatan asli daerah kabupaten/kota menunjukkan koefisien

regresi sebesar 0,00666 dengan nilai probabilitas 0,0023 atau lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Santosa & Rofiq, 2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007– 2010)” yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan pemerintah daerah yang di gali dari dalam wilayah itu sendiri, jika pendapatan asli daerah naik maka pemerintah daerah mampu untuk memenuhi modal untuk belanja daerah yang akan di lakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil estimasi secara parsial diperoleh bahwa hasil (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) di

kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Variabel kedua, dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) di kabupaten/kota Provinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Variabel ketiga, dana alokasi khusus (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah (Y) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Variabel keempat, pendapatan asli daerah (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

2. Hasil estimasi secara simultan diperoleh dana bagi hasil (X1), dana alokasi umum (X2), dana alokasi khusus (X3), dan pendapatan asli daerah (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y)
3. Dapat dilihat nilai adjusted R-squared sebesar 0,950248 atau 95,0248 persen yang dimana nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah menjelaskan variabel dependen yaitu belanja daerah. Sedangkan 4,9752

persen disebabkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Saran

1. Untuk melihat tren dan dampak kebijakan dalam jangka panjang, penelitian berikutnya dapat memperpanjang periode penelitian, dengan cakupan waktu yang lebih panjang, penelitian dapat mengidentifikasi pola perubahan belanja daerah yang lebih jelas akibat dinamika dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah.
2. Penelitian ini berfokus pada variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah, tidak mencakup variabel lain yang juga berpotensi mempengaruhi belanja daerah. Penelitian berikutnya disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi tingkat belanja daerah seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, inflasi, atau indeks pembangunan manusia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2014.
- Ariyanti, D., Masnila, N., & Choiruddin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Pulau Sumatera. *Cakrawala –Repositori IMWI*.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013).
- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- May, A., Amyulianthy, R., Chasbiandani, T., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dbh, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal. *JIAP*, 2(1), 6–7.
- Putri, W. S., & Kurnia. (2023). Pengaruh Flypaper Effect Pad, Dau, Dan Dbh Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2.
- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*,.
- .